



<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jsn>

DOI ://doi.org/10.33369/jsn.8.1.59-84

**GERAKAN SOSIAL EKS HIZBUT TAHRIR INDONESIA
PASCA PEMBUBARAN
(Studi Kasus di Bengkulu)**

***THE SOCIAL MOVEMENTS OF EX-HIZBUT TAHRIR INDONESIAN
AFTER DISBANDMENT
(A Case Study in Bengkulu)***

Sepri Yunarman¹, Nurul Fhadilah², dan Ali Akbarjono³
septayes2012@gmail.com

^{1,2,3} Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno

Abstrak

Gerakan reformasi pada tahun 1998 telah membuka kran kebebasan sosial politik bagi warga negara Indonesia. Akibatnya, animo masyarakat untuk mendirikan ormas sebagai wadah perkumpulan, baik perkumpulan sosial, ekonomi, politik dan keagamaan sangat tinggi. Salah satu ormas yang mengambil peran di era kebebasan tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun di dalam perjalanannya, kegiatan yang dilaksanakan HTI banyak berbenturan dengan banyak pihak, baik dari kelompok Islam itu sendiri maupun dengan rezim pemerintah. Pada akhirnya presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang pembubaran HTI. Akan tetapi, meskipun telah dibubarkan oleh pemerintah, banyak hipotesis yang menunjukkan bahwa gerakan sosial eks HTI masih tetap berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana eksistensi gerakan sosial eks HTI setelah dibubarkan, bagaimana tahapan-tahapan gerakan sosial yang dibangun serta bagaimana pola-pola gerakan sosial eks HTI khususnya di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat penelitian lapangan. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis menggunakan model Miles dan Hubberman melalui tiga tahap, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan eksistensi gerakan sosial eks HTI di Bengkulu tetap ada. Beberapa temuan lapangan menunjukkan eks HTI tetap melakukan kegiatan dakwah di masyarakat. Namun pada masa pandemi, kegiatan mereka lebih banyak daring daripada tatap muka. Adapun

pola Gerakan sosial eks HTI bersifat ekspresif, reformatif serta kritik. Tahap tahap gerakan sosial eks HTI, pendirian lembaga, framing isu, proses pengkaderan, pemberdayaan anggota dalam bidang-bidang kehidupan bernegara. Dari hasil kajian, tidak ditemukan kegiatan eks HTI yang mengarah pada tindakan membahayakan NKRI. Namun pemerintah perlu mengedukasi dan memantau pergerakan komunitas-komunitas eks HTI secara khusus maupun komunitas kemasyarakatan yang ada pada umumnya agar kegiatan yang dilakukan setiap ormas tersebut tetap dalam koridor nilai Pancasila dan UUD 1945.

Kata Kunci : Gerakan Sosial, Eks HTI, Provinsi Bengkulu

Abstract

The reform movement in 1998 opened the faucet of socio-political freedom for Indonesian citizens. As a result, public interest in establishing mass organizations as a forum for associations, both social, economic, political, and religious associations is very high. One of the mass organizations that took part in this era of freedom was Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). However, along the way, the activities carried out by HTI have clashed with many parties, both from the Islamic group itself and with the government regime. In the end, President Joko Widodo officially issued a Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2017 concerning the dissolution of HTI. However, even though the government has disbanded, many hypotheses show that the ex-HTI movement is still running. This study aims to examine how the existence of the ex-HTI social movement after it was disbanded, how the stages of the social movement were built, and how the patterns of the ex-HTI social movement, especially in Bengkulu province. This research uses a qualitative approach that is field research. Methods of collecting data with in-depth interviews, observation, and documentation. Furthermore, it was analyzed using the Miles and Huberman model through three stages, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study found that the existence of ex-HTI social movements in Bengkulu still existed. Some field findings indicate that former HTIs continue to carry out da'wah activities in the community. However, during the pandemic, their activities are more online than face-to-face. The pattern of the ex-HTI social movement is expressive, reformative, and critical. The stages of the ex-HTI social movement, the establishment of institutions, framing issues, the cadre process, and empowering members in the fields of state life. From the results of the study, there were no ex-HTI activities that lead to actions that endanger the Unitary State of the Republic of Indonesia. However, the government needs to educate and monitor the movement of ex-HTI communities in particular and the existing community in general so that the activities carried out by each of these organizations remain within the corridors of the values of Pancasila and the 1945 Constitution

Keywords : Social Movement, Ex HTI, Bengkulu Province

PENDAHULUAN

Gerakan reformasi pada tahun 1998 telah membuka kran kebebasan sosial politik bagi warga negara Indonesia. Setelah lebih kurang 32 tahun dikungkung oleh rezim militeristik orde baru, maka bangsa Indonesia dapat menyongsong era keterbukaan dan kebebasan di segala lini kehidupan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam pasal 28 e ayat 3 UUD 1945 yang menjamin setiap warga negara untuk dapat bebas berserikat, berkumpul serta mengeluarkan pendapat dimuka umum.

Akibatnya, animo masyarakat untuk mendirikan ormas sebagai wadah perkumpulan, baik perkumpulan sosial, ekonomi, politik dan keagamaan sangat tinggi. Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo menyebutkan bahwa total ada 406.700 ormas yang telah terdaftar di pemerintah pusat pada tahun 2018 yang lalu. Mayoritas ormas tersebut juga memiliki struktur sampai tingkat provinsi, kabupaten kota, kecamatan bahkan hingga kelurahan/desa (www.cnnindonesia.com, diakses pada 20 April 2021).

Salah satu ormas yang mengambil peran di era kebebasan tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI merupakan salah satu cabang dari organisasi Hizbut Tahrir (HT) Internasional yang telah didirikan oleh Syaikh Taqiuddin Al-Nabahani di Palestina pada tahun 1953. Secara historis, kelahiran HT didasari pada kondisi keterpurukan umat Islam diberbagai belahan dunia akibat penjajahan barat dalam waktu yang cukup lama. Adapun secara normatif, kelahiran HT merupakan upaya para pendirinya untuk menjalankan perintah Allah untuk berdakwah secara terorganisir dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar (Rafiuddin, 2015)

Tidak dipungkiri bahwa HT merupakan salah satu gerakan Islam kontemporer yang mendunia. Namun sedikit berbeda dengan gerakan Islam lainnya, HT menyebut organisasinya sebagai partai politik. Meskipun juga berbeda dengan partai politik yang ada diberbagai negara. Dimana HT merupakan partai politik Islam yang bersifat transnasionalisme. Dimana HT memiliki ideologi politik yang berupaya untuk menyatukan dunia-dunia Islam dalam satu wadah besar yakni sistem "Khilafah" (Shobron, 2016).

Meskipun belum berusia satu abad, namun pengaruh ideologi HT cukup masyhur di banyak negara di dunia. Bahkan gerakan HT berhasil masuk ke negara-negara besar yang telah memiliki ideologi mapan seperti Amerika Serikat, Jerman, Inggris dan negara-negara bekas Uni Soviet. Sementara itu, pola perjuangan HT sangat khas dibanding dengan pola gerakan Islam lainnya. Mereka seringkali membentuk konfrontasi dengan pihak pemerintah. Sangat berbeda misalnya dengan kelompok Islam Ikhwanul Muslimin yang sering bersikap adaptif dan kooperatif dengan para penguasa setempat. Hal ini menjadi ciri yang membuat HT semakin populer dikenal masyarakat. Karena dianggap gerakan Islam alternatif yang dapat menjawab kegagalan gerakan Islam selama ini (Azman, 2018).

Gerakan HT masuk ke Indonesia dengan menggunakan wadah ormas dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pada dasarnya riak gerakan HTI telah ada pada awal reformasi, namun ia baru diakui eksistensinya secara resmi pada tahun 2006 dimasa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Secara *de jure* HTI terdaftar di Dirjen Kesbangpol Kemendagri dengan status organisasi sosial keagamaan yang berasaskan Pancasila serta tunduk terhadap UUD 1945. HTI mendapat tempat istimewa di Negara Indonesia, karena satu-satunya negara yang mengakui HT secara resmi (Abdul dan Kiki, 2017 : 373).

Dengan mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah tersebut, maka HTI semakin aktif mengkampanyekan ide tentang pentingnya umat Islam di Indonesia kembali kepada khilafah. Selain itu, HTI juga terlibat aktif dalam memberikan kritik dimuka umum baik lewat media massa ataupun aksi demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan umat Islam. Menurut Gusdur, dalam menegakkan misinya, HTI cenderung tidak ingin mengambil jalur konstitusional, karena menurut mereka tujuan akhir gerakan HTI untuk menegakkan sistem khilafah global yang terintegrasi dalam kedaulatan tunggal Negara Islam (Jayanto, 2017).

Namun di dalam perjalanannya, beberapa kelompok organisasi masyarakat menilai gerakan HTI mengarah kepada paham radikalisme. Dimana paham ini dianggap dapat mengancam eksistensi Pancasila dan UUD 1945. Bahkan dalam kegiatan yang dilaksanakan HTI justru berbenturan dengan banyak pihak, baik dari kelompok Islam itu sendiri maupun dengan rezim pemerintah.

Sebagai sesama ormas, Nahdatul ‘Ulama (NU) merupakan salah satu ormas besar yang sering terjadi perbedaan dengan HTI. Salah satu aksi gelombang besar penolakan warga Nahdliyin terhadap HTI terjadi di Jawa Timur misalnya. Dimana warga Nahdliyin diwakili Banser melakukan apel besar dan mendeklarasikan kesetiaan pada NKRI dan Pancasila serta dengan tegas menolak ide khilafah. Aksi tersebut diikuti dengan melakukan penertiban spanduk, baliho, poster yang berbaur khilafah yang ada di kota Jombang Jawa Timur. Bahkan deklarasi tersebut juga diikuti oleh puluhan ormas lainnya (www.cnnindonesia.com, diakses pada 21 April 2021).

Penolakan lainnya datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang notabene sebagai wadah persatuan seluruh ormas Islam di Indonesia. Menurut pandangan tokoh MUI, HTI telah mengambil jalan yang berseberangan dengan Pancasila. Hal ini didasarkan atas manuver-manuver politik yang dilakukan oleh HTI yang berpotensi membenturkan nilai-nilai Islam dengan ideologi Pancasila. Sehingga agenda HTI dianggap bukan sekedar misi dakwah Islam semata, namun punya agenda politik yang terselubung (www.kompas.com, diakses pada 18 April 2021).

Pada akhirnya pemerintahan Joko Widodo ikut terlibat memantau dan mengkaji ideologi Khilafah yang digaungkan oleh HTI. Pada kesimpulannya, Pemerintah juga menilai bahwa HTI tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Sehingga Presiden dengan resmi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 Tentang Ormas. Regulasi ini menjadi dasar HTI dicabut izin operasinya oleh Pemerintah melalui Keputusan Kemenkumham dengan Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan pengesahan pendirian Badan Hukum HTI (Kurniawan, 2018).

Dalam keputusannya, pemerintah beralasan bahwa HTI dibubarkan karena aktivitasnya dinilai sudah mengarah pada perbuatan yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Ideologi khilafah yang dikampanyekan ormas HTI bertujuan membentuk satu kekuasaan politik yang transnasional, dimana ia menaungi banyak negara dalam satu tanah air. Hal ini tentu berbeda dengan konsep NKRI sebagai sebuah negara bangsa (*nation state*) mandiri yang tidak terikat dengan kekuasaan negara lain. Bisa jadi faktor ini juga yang membuat HTI juga dilarang oleh Negara Islam lainnya, seperti Turki, Arab Saudi, Mesir, Malaysia (Kurniawan, 2018).

Akan tetapi, meskipun telah dibubarkan oleh pemerintah, banyak hipotesis yang menunjukkan bahwa gerakan eks HTI masih tetap berjalan. Salah satunya pernyataan yang disampaikan oleh Tokoh HTI, Rokhmat S Labib pada saat diwawancarai oleh wartawan media massa. Ia menyatakan bahwa kegiatan dakwah mereka di Indonesia dipastikan akan terus berjalan, walaupun tidak melalui wadah HTI yang telah dibubarkan pemerintah. Kewajiban berdakwah merupakan kewajiban setiap muslim yang tidak dapat dilarang oleh pemerintah sehingga aktivitas mereka akan tetap ada walaupun berbeda dengan metode HTI (www.cnnindonesia.com, diakses pada 10 April 2021).

Hasil kajian Qohar & Hakiki, menyebutkan bahwa, pasca dibubarkan ada dua langkah yang akan dilakukan oleh eks HTI. *Pertama*, eks HTI akan melakukan pembentukan ormas baru. *Kedua*, eks HTI akan bermetamorfosa menjadi partai baru atau beralih haluan berpindah dan bergabung kepada partai berbasis Islam yang sudah ada. Mereka akan mencari partai-partai yang secara ideologi memiliki kemiripan dengan ideologi HTI sebelumnya, seperti PKS, PPP, PAN dan PBB. Kondisi ini akan terjadi jika mereka gagal memperjuangkan dan mempertahankan ideologinya dalam bentuk ormas (Abdul dan Hakiki, 2017).

Selanjutnya, peneliti juga sedikit mengenal beberapa aktivis yang peneliti duga merupakan eks HTI di Bengkulu. Hal ini didasarkan peneliti pernah melihat ataupun mengikuti acara HTI secara bersamaan sebelum dibubarkan pemerintah. Namun untuk membuktikan secara tertulis bahwa mereka benar sebagai anggota HTI sulit untuk dilakukan. Dari pengamatan peneliti terhadap orang-orang tersebut, memang aktifitas dakwah mereka tidak berhenti. Sebelum dampak pandemi Covid 19, peneliti pernah diundang secara khusus dalam forum diskusi publik yang mereka adakan. Mereka mengundang tokoh-tokoh perwakilan dari beberapa organisasi yang membahas tema-tema tertentu, dengan menghadirkan pimpinan mereka dari Jakarta sebagai pemateri utama.

Selain itu, berdasarkan diskusi dengan salah satu eks HTI tersebut, peneliti mendapatkan informasi bahwa mereka aktif membangun komunitas-komunitas dakwah sebagai wadah bergerak, diantaranya KBRI, KAR, KTP dan lain sebagainya. Bahkan peneliti sering diberikan tabloid atau Koran berbentuk cetak media “A-W”

serta Buletin “KFH” sebagai bahan bacaan terkait pengetahuan Islam serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat Islam di Indonesia secara aktual.

Selain itu ada hal yang juga cukup mengusik hati peneliti, berdasarkan hasil survei BNPT pada tahun 2017 disebutkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi tertinggi akan paham radikalisme dengan angka 58,58%, disusul Provinsi Gorontalo dengan angka 58,48%, kemudian Sulawesi Selatan dengan angka 58,42%, adapun Provinsi Lampung sebesar 58,38% serta Provinsi Kalimantan Utara dengan angka 58,32% (www.bengkuluekspres.com, diakses pada 20 April 2021). Akan tetapi hasil angka 58% tersebut belum dapat dipastikan apakah termasuk paham yang dibawa eks HTI juga atau tidak.

Oleh karena itu, secara khusus penelitian bertujuan untuk mengkaji tentang dinamika gerakan sosial eks HTI setelah dibubarkan khususnya di wilayah provinsi Bengkulu. Apakah eksistensi gerakan sosial yang dilakukan oleh eks HTI masih ada atau tidak. Bagaimana tahapan-tahapan gerakan sosial yang dibangun serta bagaimana pola-pola gerakan sosial yang terjadi. Sehingga diharapkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah, baik tingkat provinsi maupun nasional untuk membuat kebijakan dalam mengatasi konflik sosial secara nasional, baik antara sesama organisasi masyarakat ataupun antara ormas dengan negara yang dapat mengancam keutuhan NKRI.

Penelitian yang peneliti lakukan ini menggunakan kerangka teori gerakan sosial Sidney Tarrow. Memang dalam kajian tentang gerakan sosial, ruang lingkup kajiannya cukup luas. Sehingga beragam pakar telah menjelaskan tentang konsep gerakan sosial (*sosial movement*). Salah satunya adalah sosiolog Anthony Giddens. Ia menyatakan bahwa gerakan sosial merupakan suatu upaya bersama suatu kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan bersama atau suatu gerakan untuk mencapai tujuan didasari tindakan kolektif di luar lembaga-lembaga formal (Fadillah Putra, 2006)

Sedikit berbeda dengan konsep gerakan sosial Giddens, Tarrow mendefinisikan gerakan sosial sebagai tantangan kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan dan solidaritas, dalam konteks interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, lawan atau penguasa. Disini terdapat 4

kunci penting, yakni tantangan kolektif, tujuan bersama, solidaritas sosial dan interaksi berkelanjutan (Manulu, 2016).

Konsep gerakan sosial menurut Tarrow ini bisa kita ambil contoh dalam peristiwa gerakan reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Dimana seluruh elemen masyarakat melakukan gerakan bersama secara serentak diseluruh wilayah Indonesia dengan tujuan yang sama yaitu melengserkan presiden Soeharto sebagai kepala negara karena kebijakannya dianggap telah merugikan seluruh kepentingan rakyat Indonesia. Akibat gerakan rakyat yang besar dan masif ini membuat Soeharto kehilangan legitimasi politik sehingga harus mengundurkan diri sebagai pemegang otoritas kekuasaan paling tinggi di Indonesia.

Peneliti memilih teori gerakan sosial Tarrow sebagai pisau analisa dalam penelitian ini karena dianggap relevan dengan realitas serta data yang dibutuhkan di lapangan nantinya. Dalam hal ini, ada sebuah kelompok masyarakat (eks ormas HTI) telah dibubarkan oleh rezim pemerintah tanpa melalui proses pengadilan. Sebagai pihak yang dianggap dirugikan oleh kebijakan pemerintah, maka peneliti ingin melihat bagaimana bentuk serta dinamika perjuangan yang dilakukan oleh eks HTI untuk tetap eksis dalam memperjuangkan hak-haknya di NKRI.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana semua proses penelitian menggunakan prosedur, metode, serta sudut pandang penelitian kualitatif. Salah satu cirinya dari penelitian kualitatif yaitu data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar dan sedikit angka-angka (Damin, 2002). Selain itu, ciri penelitian kualitatif berikutnya yakni membaca dan menjelaskan realitas masyarakat berdasarkan sudut pandang subyek penelitian, bukan subyektif peneliti (Moleong, 2019).

Jenis penelitian yang akan dilakukan yakni bersifat penelitian lapangan (*field research*). Jenis *field research* diambil peneliti dalam rangka untuk memperdalam hasil penelitian dengan cara mempelajari keseluruhan dari latar belakang subyek penelitian di lapangan hingga saat ini (Burhan, 2010). Sedangkan metode penelitian yang diambil bersifat deskriptif, dimana peneliti mengkaji suatu objek penelitian

dengan menjabarkan hasilnya secara detail dan runut untuk mengetahui tentang situasi dan kondisi dari subjek yang sebenarnya (Neuman, 2013).

Diharapkan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, hasil yang didapatkan peneliti lebih objektif dan kompleks. Dalam hal ini peneliti dapat mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif tentang gerakan sosial eks HTI pasca dibubarkan oleh pemerintah khususnya di Provinsi Bengkulu. Karena informasi tentang fenomena ini belum banyak diketahui oleh masyarakat umum.

Informan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, informan merupakan pihak-pihak yang membantu peneliti untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian. Informan penelitian dapat pula disebut sebagai responden yakni pihak memberikan keterangan penting sesuai kebutuhan peneliti (Arikunto, 2019). Untuk memilih informan/responden dalam penelitian ini digunakan reknik Purposive Sampling dimana informan dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti yang disebabkan pihak tersebut dianggap dapat memberikan data dengan kualitas tinggi (Sugiyono, 2015).

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan yaitu: *pertama*, informan utama dan informan pendukung. Informan utama dalam penelitian ini adalah orang-orang yang peneliti yakini mantan anggota HTI di Provinsi Bengkulu sebelum. Namun untuk membuktikan secara tertulis mereka adalah anggota HTI dahulunya merupakan suatu kesulitan tersendiri bagi peneliti. Adapun informan pendukung dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang mengetahui seluk-beluk organisasi HTI, seperti pihak pemerintah, pimpinan ormas Islam ataupun masyarakat umum.

Waktu dan Tempat Penelitian

Berdasarkan waktu yang tersedia, maka penelitian ini akan dilaksanakan selama 5 bulan, yakni dari rentang bulan Juni hingga bulan November pada tahun 2021. Sementara itu, tempat pengambilan data penelitian dilakukan di wilayah Provinsi Bengkulu, diantaranya Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Muko-Muko. Kelima Kabupaten dan Kota tersebut dipilih karena dianggap daerah yang memungkinkan peneliti mendapatkan data yang signifikan.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengikuti metode penelitian kualitatif secara umum yakni dengan melakukan wawancara mendalam, mengobservasi serta melakukan pengumpulan dokumen dokumen penting yang terkait dengan topik penelitian. Wawancara mendalam yaitu peneliti mendatangi informan secara tatap muka kemudian melakukan percakapan yang terarah hingga mendapatkan data-data yang diperlukan (Lexy J. Moleong, 2019). Namun sebelum melakukan percakapan tersebut, peneliti harus lebih dulu menyiapkan pedoman wawancara (daftar pertanyaan) yang tidak kaku dalam artian bisa dirubah seiring kebutuhan data yang mau didapatkan (Burhan, 2010).

Selain wawancara mendalam, peneliti juga melakukan observasi terhadap subyek penelitian. Observasi disini dimaksudkan ketika peneliti menggunakan pancaindera untuk merekam segala situasi dan kondisi yang terjadi langsung pada informan maupun pada hal-hal disekitar informan kemudian menulisnya kedalam catatan penelitian. Dalam Penelitian ini observasi dilakukan secara non-sistematis dalam arti tanpa adanya instrumen pengamatan yang disiapkan terlebih dahulu (Narbuko & Achmadi, n.d.).

Kemudian peneliti melakukan pengumpulan dokumentasi di tempat penelitian untuk memperoleh data secara langsung. Jenis dokumentasi yang dikumpulkan oleh peneliti dapat berupa barang-barang tertulis yang dapat dibaca dan dipelajari seperti buku-buku, peraturan laporan kegiatan, foto-foto yang terkait langsung dengan fenomena yang diteliti (Arikunto, 2019).

Teknik Analisis Data

Menganalisis hasil penelitian berarti kita melakukan kajian yang komprehensif terhadap temuan-temuan lapangan dan dihubungkan dengan teori-teori yang relevan. Teknik analisis kualitatif dapat dipahami suatu proses yang dilakukan oleh peneliti untuk merangkai temuan penelitian baik hasil wawancara, hasil pengamatan, dokumentasi dan catatan lapangan secara sistematis sehingga menjadi sebuah kesimpulan yang mudah untuk dibaca dan dipahami (Sugiyono, 2015).

Analisis data kualitatif secara umum memiliki dua model, yakni model Miles dan Huberman dan model Spydley. Dalam penelitian ini, digunakan model analisis

Miles dan Huberman yang dimulai dari reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan akhir. Akan tetapi, kesimpulan tersebut tetap masih dapat dikoreksi dan diberi masukan jika masih ada yang tidak cocok dengan temuan penelitian (Huberman & Miles, 1992)

PEMBAHASAN

Setelah melakukan wawancara ke berbagai informan utama ataupun pendukung yang sesuai dengan kriteria penelitian ini, maka kami dapat menemukan data-data yang memungkinkan untuk menjawab tujuan penelitian yang telah dibuat di awal yakni masih adakah gerakan sosial eks HTI di Bengkulu pasca pembubaran, bagaimanakah polanya, serta bagaimana tahap-tahap gerakan sosial yang mereka bangun untuk mencapai tujuan dakwahnya kedepan. Berikut ini akan peneliti uraikan sesuai dengan temuan data dilapangan.

a. Eksistensi Gerakan Sosial eks HTI di Provinsi Bengkulu Pasca Pembubaran.

Tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan sosial eks HTI di Provinsi Bengkulu masih ada. Meski pemerintah dianggap memiliki kewenangan untuk membubarkan HTI secara organisasi, namun pemerintah tidak dapat menghapus ideologi HTI dalam diri eks anggotanya. Faktanya mereka sudah tidak mempermasalahkan apa nama organisasinya, namun yang lebih penting cita-cita/ideologi mereka dapat ditegakkan baik di level Indonesia maupun level dunia. Menurut mereka, pemerintah boleh melarang kegiatan HTI, namun tentu tidak boleh melarang dakwah Islam yang mereka sampaikan. Karena kebebasan menjalankan ajaran agama juga dijamin oleh Undang-Undang. Oleh karena itu meskipun organisasi HTI telah dibubarkan mereka dapat membentuk organisasi/lembaga baru untuk melakukan dakwah di masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh satu satu eks HTI yang peneliti wawancarai.

“.....Dakwah itu tidak mesti di HTI, masih banyak wadah lain untuk mendakwahkan Islam. Pemerintah bisa membubarkan HTI, tapi tentu tidak bisa melarang kita berdakwah. Misi untuk mendakwahkan Islam tetap menjadi kewajiban setiap umat muslim...” (Wawancara ALI, Eks HTI pada tanggal 6 Agustus 2021)

Selain itu hal yang sama disampaikan oleh eks HTI lainnya. Menurutnya, sejak HTI resmi dibubarkan oleh pemerintah, mereka tetap aktif dalam berdakwah di masyarakat. Untuk mendapatkan keamanan dalam menjalankan aktivitasnya, mereka mendirikan komunitas baru yang lintas segmen sekaligus dengan simbol-simbol baru yang tidak memiliki hubungan dengan ormas HTI. Ada beberapa komunitas yang peneliti yakini memiliki kaitan dengan eks HTI. Seperti yang mengarah ke bidang ekonomi seperti “MATRI”, ada komunitas yang bergerak pada hijrah para pemuda yakni “KTP” ada juga komunitas yang fokus pada gerakan mahasiswa “BAKORLEMDAKA” yang menaungi aktifitas mahasiswa dari seluruh kampus. Dengan demikian aktifitas dakwah mereka tidak terhenti dengan kebijakan pembubaran.

“.....Sejak HTI dibubarkan pemerintah ya kami harus terima karena tak mungkin juga untuk melawan. Namun tentu kami harus berpikir untuk buat lembaga baru agar kami tetap dapat mendakwahkan Islam. Lalu didirikanlah secara nasional sampai daerah komunitas baru seperti “MATRI”, ada juga untuk dakwah kepada para remaja dan pemuda komunitas KTP, ada juga untuk lokal komunitas “BENGRIS”, termasuk organisasi dikalangan mahasiswa yaitu “BAKORLEMDAKA” Sebagai ganti Organisasi “GAPEM” dahulunya..... (Hasil wawancara dengan ARI, Eks HTI pada tanggal 12 September 2021).

Gambar 1. Poster Kegiatan Bedah Film Jejak Khilafah



Sumber : Data penelitian Sepri dkk, tahun 2021

Salah satu aktivis mahasiswa eks HTI yang berhasil kami wawancarai juga mengkonfirmasi hal yang sama. Ia menyatakan bahwa saat ini kegiatan mereka tetap aktif. Mereka mengadakan kegiatan-kegiatan eksternal dalam bentuk seminar ataupun talkshow dengan mengundang pemateri nasional membahas tema-tema

tertentu. Biasanya diadakan digedung akan tetapi semenjak Pandemi Covid 19 kegiatan lebih banyak dilakukan secara online melalui media zoom.

“..... kegiatan kita masih aktif pak. Tapi tidak seperti dulu lagi pak. Biasanya kita mengundang tokoh-tokoh digedung dengan pemateri ustadz kita dari Jakarta. Tapi sekarang susah untuk seperti itu karena ada Covid 19. Makanya kita lebih banyak nge-Zoom seminarnya pak..... (Hasil wawancara dengan RDI, aktivis mahasiswa eks HTI, tanggal 26 September 2021).

Gambar 2. Kegiatan Webinar tentang Kapitalisme



Sumber : Data Penelitian Sepri Dkk, Tahun 2021

Informasi yang sama juga diberikan oleh seorang eks anggota komunitas ekonomi “MATRI”. Ia menyatakan bahwa sejak awal beliau sangat tertarik untuk bergabung dengan komunitas “MATRI” karena memang dakwah yang mereka lakukan sangat membantu permasalahan masyarakat khususnya orang-orang yang terbelit hutang dengan bank konvensional. Selain mengkampanyekan anti riba, mereka juga siap melakukan pendampingan bagi masyarakat yang ingin memutus pembayaran riba pada bank. Namun pada akhirnya ia melihat bahwa komunitas tersebut beberapa pengurus berasal oleh Eks HTI yang masih mendakwahkan ideologi HTI dalam beberapa kegiatan. Hal ini menjadi salah satu alasan bapak KWI mundur sebagai anggota dan mendirikan komunitas sejenis juga.

“.....Komunitas “MATRI” ini sangat bagus menurut saya, karena programnya benar-benar mempraktekkan sistem Islam, khususnya dalam bidang ekonomi. Jadi pengurus “MATRI” ingin mengajak anggota dan masyarakat secara umum untuk anti terhadap riba dengan cara tidak berhutang dengan Bank. Kalaupun sudah terlanjur berhutang, mereka siap untuk membimbing agar terbebas dari riba. Itu yang membuat saya bergabung. Namun semakin kesini saya melihat, ada beberapa pengurus yang masih mengkampanyekan ideologi Khilafah dan lain-lain. Maka saya memutuskan untuk keluar dari komunitas, dan saya mendirikan komunitas

baru dengan teman-teman yang lain. (Hasil wawancara dengan bapak KWI, eks anggota "MATRI", tanggal 26 September 2021).

Selain dengan eks HTI, peneliti juga menghimpun informasi dari pihak-pihak non eks HTI yang menjadi informan penelitian kami. Salah satunya misalnya dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu. Menurutnya setelah HTI dibubarkan tidak serta merta akan menghapuskan ideologi HTI (Khilafah) dalam pemikiran para eks anggotanya. Karena HTI sudah lama berdiri dan melakukan aktivitas dakwah di Indonesia. Kalaupun sekarang ormas HTI dibubarkan, itu mungkin hanya membubarkan lembaganya saja, namun belum tentu dapat menghapuskan ideologinya. Dalam kondisi ini tentu para eks HTI akan mencari cara bagaimana untuk dapat bertahan ditengah ancaman yang dapat membahayakan eksistensi ideologi mereka.

"...Yang dibubarkan pemerintah itu organisasinya kan, tapi belum tentu ideologinya. Saya kira agak sulit untuk menghapuskan ideologi pada pikiran penganutnya. Meskipun HTI resmi dibubarkan, mungkin para pengikut eks HTI masih bisa melanjutkan dakwahnya. Hanya saja pasti dengan wajah baru (Mereka lebih tau bagaimana untuk aman dalam menjalankan misi dakwahnya) Hasil wawancara dengan bapak RAH, MUI Provinsi Bengkulu, tanggal 3 Juli 2021).

Namun, pimpinan MUI tersebut juga menyampaikan penilaiannya terhadap eks ormas HTI bahwa secara umum ajaran dan dakwahnya tidak menyimpang dari ajaran Islam (Al-qur'an dan As Sunnah). Bahkan gerakan dakwah mereka sangat bermanfaat dalam mengajak masyarakat untuk berIslam secara baik. Hanya saja jargon "khilafah" yang mereka kampanyekan itu dianggap banyak pihak berpotensi memecah belah anak bangsa yang pada akhirnya akan mengganti ideologi Pancasila di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

".....Terlepas masalah pembubaran eks HTI oleh pemerintah, dakwah HTI ada baiknya untuk mengajak umat pada kebaikan. Anak muda diajak berhijrah, menutup aurat. Orang diajak sholat dan sebagainya. Namun, pola dakwah HTI yang sering berseberangan dengan pemerintah dengan membawa simbol-simbol khilafah berdampak negatif. Mereka dinilai ingin menukar NKRI dengan Negara Islam. (Hasil wawancara dengan bapak RAH, MUI Provinsi Bengkulu, tanggal 3 Juli 2021).

Selanjutnya, peneliti juga melakukan observasi di dunia maya, diantaranya mengamati dakwah eks HTI di media sosial baik di akun Facebook, Instagram

maupun WA Gorup eks anggota yang peneliti yakini. Hasilnya tim peneliti menemukan mereka melakukan kegiatan dakwah melalui virtual, khususnya media zoom yang dikampanyekan melalui poster-poster di akun media sosial yang mereka buat. Secara garis besar, kegiatan yang mereka lakukan dibagi secara dua tema besar. Pertama mengedukasi masyarakat kepada sistem Islam secara kaffah (sempurna), Kedua diskusi publik yang mengkritik kebijakan pemerintah saat ini.

Tim peneliti juga mengikuti kegiatan webinar yang dilakukan oleh komunitas eks HTI. Kegiatan tersebut bertemakan Hijrah yang diisi oleh Pembicara nasional salah satu ustadz muda Eks HTI yang sudah sangat familiar yakni Ust Felix Siaw. Dari kegiatan webinar tersebut, para pemateri menyampaikan materi urgensi dan keutamaan bagi orang yang berhijrah. Memang tidak didapatkan ajakan ataupun arahan yang mengarah kepada ideologi eks HTI.

Gambar 3. Kegiatan Webinar dengan Ust Felix Siaw dengan Tema “Hijrah”



Sumber : Data Penelitian Sepri dkk, Tahun 2021

Selanjutnya peneliti juga mewawancari unsur Pemerintah Daerah maupun Pimpinan Ormas tingkat daerah. Namun ada temuan yang cukup menarik. Dimana mayoritas informan tersebut tidak mengetahui seluk beluk HTI secara langsung. Hanya melihat dan mendapat informasi dari media saja. Mereka tidak mengetahui bentuk dan ideologi eks HTI secara detail. Sehingga wajar jika mereka menyebutkan bahwa tidak ada keberadaan HTI diwilayah mereka.

“.... Saya tidak tau detail apa itu ormas HTI. Selama ini hanya dengar dari berita televisi dan media online. Bahwa ormas HTI sudah dibubarkan oleh pemerintah. Namun saya belum pernah melihat atau berinteraksi secara langsung dengan pengurus anggota HTI. Setau saya di daerah Kaur belum ada tanda-tanda ormas HTI. (Hasil wawancara dengan bapak ST, Ormas NU Kabupaten Kaur pada tanggal 6 Oktober 2021).

“.....Sebagai pemerintah daerah, kami telah berkomunikasi dengan FKUB ataupun BINDA, namun hasil informasi dari pihak mereka belum ditemukan adanya indikasi Ormas HTI di kabupaten Bengkulu Selatan. Kalau saya secara pribadi tidak terlalu memahami ormas HTI. (Hasil wawancara dengan bapak GM, Pemda Kabupten Bengkulu Selatan pada tanggal 07 Oktober 2021).

b. Pola Gerakan Sosial Eks HTI di Bengkulu

Pada sub bab diatas telah diuraikan tentang eksistensinya ideologi eks HTI di Provinsi Bengkulu. Maka pada sub bab ini peneliti akan menguraikan hasil wawancara dan observasi terkait bagaimana pola-pola gerakan sosial yang terjadi pada eks HTI di Bengkulu. Apakah memiliki kesamaan dengan pola eks HTI di wilayah lain atau tidak. Berikut ini peneliti uraikan beberapa data lapangan yang didapat.

Sejak pemerintah resmi membubarkan dan melarang seluruh aktifitas dakwah HTI di Indonesia, maka para eks HTI berupaya untuk berdakwah dengan wadah lain yang dianggap lebih aman dari pengawasan rezim pemerintah. Para eks HTI telah menyadari bahwa kondisi Indonesia saat ini tidak aman bagi komunitas mereka. Oleh karena itu mereka lebih memilih melakukan kegiatan yang lebih *soft* dengan berbagai penyesuaian pada situasi dan kondisi dibanding melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat konfrontatif terbuka seperti demo secara besar-besaran. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh salah satu eks HTI yang peneliti wawancarai.

“....kami sadar bahwa rezim saat ini kurang bersahabat dengan umat Islam. Sehingga sejak dibubarkan oleh pemerintah, kami tidak lagi melakukan aksi demonstrasi dijalanan, karena akan semakin merugikan kita sendiri. Itu juga yang menjadi arahan pimpinan pusat....” (wawancara ARI, Eks HTI pada tanggal 12 September 2021).

Gambar 4. Kegiatan Webinar yang diisi oleh Ust Ismail Yusanto (eks HTI)



Sumber : Data Penelitian Sepri dkk, Tahun 2021

Namun, meski eks HTI melakukan penyesuaian dalam metode dakwahnya, namun visi dakwahnya tetap dilakukan dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Mereka hanya berganti perahu (organisasi) untuk menyampaikan dakwah kepada umat Islam. Karena dakwah merupakan kewajiban, tanpa harus melalui organisasi HTI. Bahkan bagi mereka tidak ada yang bisa melarang dakwah sekalipun seorang Pemerintah. Hal ini sebagaimana diungkapkan hasil informan sebelumnya.

“..... Dakwah itu tidak mesti di HTI, masih banyak wadah lain untuk mendakwahkan Islam. Pemerintah bisa membubarkan HTI, tapi tentu tidak bisa melarang kita berdakwah. Misi untuk melakukan dakwah Islamiyah tetap menjadi tugas kita sebagai Muslim...” (Wawancara ALI, Eks HTI pada tanggal 6 Agustus 2021)

Terkhusus masa pandemi Covid 19, komunitas eks HTI tetap melakukan kegiatan dakwah di Bengkulu. Hanya saja karena ada kebijakan pembatasan keramaian oleh pemerintah, maka eks HTI juga membatasi dari pertemuan tatap muka. Mereka tetap melakukan seminar, diskusi publik dengan mengundang tokoh nasional melalui media zoom meeting.

“.....sejak kita dibubarkan oleh pemerintah, kita tetap mengadakan kegiatan-kegiatan dakwah dengan menggunakan perahu (organisasi) baru. Kita mengadakan diskusi publik dengan mengundang tokoh-tokoh agama, ormas, pendidikan di daerah yang di isi pemateri dari pusat. Hanya saja sejak masa pandemi semua kegiatan kita lebih banyak secara virtual agar tidak menyalahi kebijakan pemerintah....” (wawancara ARI, Eks HTI Bengkulu).

Gambar 5. Buletin Dakwah yang di Share via WA



Sumber : Data Penelitian Sepri dkk, Tahun 2021

Setelah dibubarkan pemerintah, komunitas eks HTI tetap mendakwahkan sistem Islam secara Kaffah. Bahkan mereka mendirikan beragam komunitas sesuai tema besar dakwahnya. Dalam dakwah dalam bidang ekonomi, mereka mendirikan komunitas “MATRI” dalam bidang kemahasiswaan ada komunitas “BAKORLEMDAKA”, dalam bidang kepemudaan ada komunitas “KTP” dan beberapa komunitas lainnya.

Meskipun banyak komunitas yang dibangun, kesemuanya tetap menuju satu arah yakni bagaimana menanamkan sistem Islam ke umatnya secara menyeluruh. Hanya dengan metode dan kemasan yang berbeda. Tentu hal ini bagian dari strategi tersendiri dari komunitas eks HTI untuk melakukan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Namun, dibalik gerakan penyesuaian yang mereka lakukan, peneliti menemukan bahwa komunitas eks HTI masih memiliki beberapa pandangan yang berbeda dengan pemerintah. Salah satunya mereka masih konsiten tidak mau terlibat untuk mengikuti proses pemilu, baik sebagai calon ataupun pemilih. Selain itu mereka selalu aktif melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro Islam/Rakyat dengan melakukan seminar ataupun diskusi publik. Termasuk mereka tidak ingin mengikuti kebijakan pemerintah pada masa pandemi seperti pemberian vaksin.

“....kami menilai masih ada kebijakan pemerintah di negara kita yang belum sesuai dengan sistem ajaran Islam. Termasuk masalah riba di Bank. Baik bank syariah atau bank konvensional kadangkala masih sama-sama

menggunakan riba menurut kami.Termasuk masalah pandemi, kami tidak ikut untuk vaksin yang dianjurkan pemerintah..” (Wawancara ALI, eks HTI tanggal 6 Agustus 2021).

“..... kami tetap menolak untuk terlibat dalam politik demokrasi, sampai sekarang anggota kami masih mayoritas golput saat Pilkada. Kalo memang anggota kita sudah siap untuk masuk kedalam pemerintahan, baru kita perbaiki sistem yang ada..... (wawancara dengan ARI, Eks HTI tanggal 12 September 2021).

c. Tahapan Gerakan Sosial Eks HTI Bengkulu

Dari hasil wawanwacara terhadap informan, pengamatan di masyarakat, serta pengumpulan dokumentasi yang peneliti peroleh maka dapat diuraikan beberapa tahapan gerakan sosial eks HTI di Bengkulu diantaranya peneliti jelaskan berikut ini.

Langka pertama yang dilakukan eks HTI setelah dibubarkan oleh pemerintah adalah membentuk wadah baru sebagai pengganti wadah lama. Bahkan mereka mendirikan komunitas-komunitas baru dengan beragam lingkup. Ada komunitas “MATRI” yang bergerak pada penyadaran umat tentang bahaya utang dan bunga Bank. Ada komunitas “KTP” yang bergerak kepada penyadaran pemuda untuk hijrah dari sikap-sikap hedonisme. Ada komunitas “BENGRIS” yang bergerak kepada isu-isu kebangsaan termasuk kritik kebijakan pemerintah dengan menghadirkan sistem Islam sebagai solusi. ada komunitas “BAKORLEMDAKA” sebagai organisasi kemahasiswaan menaungi aktivis mahasiswa dari berbagai kampus. Sebagaimana sudah dijelaskan diatas sebelumnya.

“.....Sejak HTI dibubarkan pemerintah ya kami harus terima karena tak mungkin juga untuk melawan. Namun tentu kami harus berpikir untuk buat lembaga baru agar kami tetap dapat mendakwahkan Islam. Lalu didirikanlah secara nasional sampai daerah komunitas baru seperti “MATRI”, ada juga untuk dakwah kepada para remaja dan pemuda komunitas “KTP”, ada juga untuk lokal Komunitas “BENGRIS”, termasuk organisasi dikalangan mahasiswa yaitu “BAKORLEMDAKA” (hasil wawancara dengan ARI, Eks HTI)

Tahap Berikutnya adalah melakukan penyadaran kepada umat dengan menyebarkan ide-ide pemikiran sistem Islam melalui kegiatan seminar-seminar, pelatihan, dialog, majalah/Buletin. Mereka menganggap masih ada kebijakan pemerintah yang dinilai bertentangan dengan sistem Islam, baik dalam bidang

politik, ekonomi, sosial budaya dan lainnya. Sehingga diperlukan pihak-pihak yang mendakwahkan nilai-nilai Islam kepada umat. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan.

“....Kami menilai masih banyak bidang dalam negara kita yang belum sesuai dengan sistem Islam. Termasuk masalah riba di Bank. Baik bank syariah atau bank konvensional kadangkala masih sama-sama menggunakan riba. Belum lagi dalam pergaulan anak-anak muda kita yang semakin hedonis. Termasuk sistem politik kita yang berasal dari barat yang telah banyak memberikan mudharat kepada umat. Itu semua perlu diubah dengan menawarkan konsep Islam kepada umat sebagai satu-satunya solusi. Ini yang kami lakukan baik melalui webinar, pelatihan, majalah dan brosur yang kami sebar. (Wawancara ALI, eks HTI).

Selanjutnya, setelah proses dakwah melalui kegiatan webinar, workshop, training, diskusi publik, maka tahap berikutnya adalah proses perekrutan anggota. Komunitas eks HTI akan melakukan pendekatan bagi peserta kegiatan yang dinilai memiliki potensi. Mereka akan diajak untuk melakukan kegiatan yang lebih intensif dengan jumlah peserta terbatas, untuk mengkaji sistem Islam yang lebih komprehensif. Jika peserta tersebut dapat melewati proses dalam waktu tertentu baru dapat dianggap menjadi anggota. Sebagaimana diungkapkan salah satu informan.

“.....Kegiatan yang kami lakukan di komunitas “MATRI” itu terbuka untuk umum. Kami ajak teman-teman ataupun anggota group-group umum. Setelah selesai pelatihan atau training, kami lakukan pendekatan dengan para peserta. Kami tawarkan mereka untuk ikut training lanjutan. Nanti endingnya mereka yang aktif akan menjadi anggota tetap bahkan pengurus di komunitas kita. (Wawancara ARI, eks HTI).

“..... Di komunitas mahasiswa kami juga melakukan perekrutan dengan kegiatan pelatihan atau seminar. Biasanya peserta yang tertarik dengan kegiatan kita pasti mengontak panitia lagi setelah selesai acara. Di sanalah kita follow up mereka untuk menjadi anggota. (Wawancara RDI, mahasiswa eks HTI).

Tahap terakhir yang menjadi visi eks HTI kedepan adalah ikut terlibat di bidang-bidang pemerintahan. Memang saat ini eks HTI masih belum mau terlibat dalam politik pemerintahan karena mereka menganggap pemerintah saat ini belum banyak menjalankan sistem Islam dengan Baik. Tapi mereka meyakini jika suatu saat nanti SDM mereka sudah siap, mereka siap memberdayakan anggota dalam

pemerintahan untuk menjalankan sistem Islam dengan baik agar Indonesia lebih maju.

“..... kami tetap menolak untuk terlibat dalam politik demokrasi, sampai sekarang anggota kami masih mayoritas golput saat pilkada. Kalo memang anggota kita sudah ada yang siap untuk masuk ke bidang pemerintahan, baru kita perbaiki sistem yang ada..... (wawancara dengan ARI, Eks HTI)

Dari hasil temuan-temuan penelitian diatas, maka gerakan sosial yang dilakukan oleh eks HTI Bengkulu dapat dijelaskan dalam kacamata teori Tarrow. Menurut Tarrow (1998) gerakan sosial dipahami sebagai upaya kolektif yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan dan solidaritas yang sama, dalam konteks interaksi yang berkelanjutan dengan kelompok elite, lawan atau penguasa. Dalam hal ini eks HTI melakukan interaksi dengan pihak pemerintah karena dianggap telah merugikan kepentingan mereka.

Dalam konteks ini, pemerintah memang dapat membubarkan HTI secara lembaga, akan tetapi tidak dapat menghapus ideologinya. Meskipun organisasi HTI sudah tidak ada, namun banyak cara yang dilakukan eks HTI untuk melakukan kegiatan dakwahnya. Mereka akan berupaya untuk mengoreksi kebijakan penguasa baik nampak ataupun tidak secara bersama-sama dan berkelanjutan agar dapat sesuai dengan sistem Islam.

Dalam perjalanannya, gerakan sosial eks HTI dapat melakukan adaptasi terhadap situasi dan kondisi yang untuk menjaga eksistensi mereka. Misalnya, disaat lembaga mereka masih legal, HTI seringkali unjuk kekuatan demonstrasi dengan massa yang besar dan massif. Namun disaat, organisasi mereka sudah tidak legal, mereka lebih memilih melakukan kritikan dalam bentuk seminar atau diskusi publik. Begitu juga dalam hal teknis, sebelum pandemi mereka biasa melakukan kegiatan secara tatap muka, namun setelah ada kebijakan pembatasan keramaian pada masa pandemi, eks HTI juga melakukan kegiatan secara daring sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Menurut Tarrow, komponen dasar yang harus dimiliki suatu gerakan sosial struktur, tantangan kolektif, tujuan bersama, identitas kolektif, dan politik perlawanan. Dalam hal ini, setelah struktur lama dibubarkan, maka mau tidak mau eks HTI harus membentuk struktur baru. Makanya didirikanlah komunitas-komunitas

baru seperti, “MATRI”, “BENGRIS”, KTP, “BAKORLEMDAKA”, dan sebagainya. Setelah itu mereka meyakinkan setiap kader ataupun masyarakat bahwa kebijakan pembubaran oleh pemerintah merupakan tindakan yang tidak berkeadilan. Tujuan mereka jelas bagaimana agar pemerintah tidak semena-mena dalam memimpin negara termasuk membuat kebijakan sesuai dengan sistem Islam. Politik perlawanan mereka akan muncul apabila kebijakan pemerintah dinilai merugikan rakyat dan umat Islam, maka mereka tidak segan melakukan kritik secara terbuka melalui webinar, diskusi publik atau lainnya.

Tarrow juga menyebutkan bahwa suatu gerakan sosial membutuhkan tiga frame/tahap, yakni *agregate frame*, *consensus frame* dan *collective action frame*. Tahap *agregate frame*, adalah proses pengartian isu sebagai masalah sosial. Individu yang mendengar frame dari peristiwa tersebut sadar bahwa isu tersebut adalah masalah bersama yang berpengaruh di setiap individu. Pada tahap ini, eks HTI melakukan pembelaan isu baik secara formal di pengadilan maupun informal di masyarakat secara luas bahwa pemerintah telah membuat kebijakan yang melanggar hak warga Negara untuk berkumpul dalam wadah organisasi. Dengan ini, eks HTI bertujuan untuk semakin meningkatkan solidaritas anggota dan dukungan publik.

Sedangkan pada tahap *consensus frame*, yaitu proses definisi yang berkaitan dengan masalah sosial hanya dapat diselesaikan dengan tindakan kolektif. Hal ini mengkonstruksi perasaan dan identifikasi dari individu untuk bertindak secara kolektif. Maka eks HTI berusaha merumuskan strategi untuk mempertahankan eksistensi mereka dengan membentuk wadah baru. Sebagai mana temuan di lapangan, tahap gerakan sosial yang dilakukan oleh Eks HTI Bengkulu dengan membuat komunitas-komunitas baru yang menghilangkan lambang ataupun ciri khas yang berkaitan dengan HTI.

Kemudian, tahap *collective action frame*, adalah proses yang memaparkan kenapa dibutuhkan suatu tindakan kolektif, serta tindakan kolektif apa yang harus dilakukan. Melalui komunitas-komunitas yang dibuat mereka menyebarkan ide, gagasan untuk mempengaruhi isu publik melalui kegiatan-kegiatan seminar, pelatihan dan berita-berita dalam majalah ataupun brosur. Secara umum, isu yang mereka bangun terbagi kedalam dua isu besar, mendakwahkan nilai-nilai Islam ke

masyarakat dan melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan keadilan, hukum, ekonomi dan sosial.

Selanjutnya mereka melakukan perekrutan anggota untuk dibina sesuai dengan ideologi yang mereka yakini. Kader-kader yang mereka bina dibiarkan untuk beraktivitas dan bekerja di lini masing-masing, baik pada lingkup swasta maupun pada lembaga pemerintah. Jika suatu waktu, kapasitas anggota telah siap untuk terlibat di posisi penting dalam pemerintahan baru mereka melakukan perubahan kebijakan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut.

Sementara itu, menurut Syarbaini, pola gerakan sosial ada 9 bentuk, yaitu : Gerakan perpindahan, Gerakan ekspresif, Gerakan utopia, Gerakan reformasi, Gerakan revolusioner, Gerakan regresif, Gerakan perlawanan, Gerakan progresif, Gerakan konservatif. Menurut pengamatan peneliti di lapangan, pola gerakan sosial yang dipakai oleh eks HTI di Bengkulu secara umum menggunakan 3 pola yakni Gerakan ekspresif, Gerakan reformasi dan Gerakan perlawanan.

Gerakan ekspresif yaitu tindakan penduduk untuk mengubah sikap mereka sendiri dan bukan mengubah masyarakat. Individu-individu dalam jenis gerakan ini sebenarnya hanya merubah persepsi mereka terhadap lingkungan luar yang kurang menyenangkan daripada mengubah kondisi luar itu sendiri. Secara pelan, eks HTI saat ini mulai menerima keputusan pemerintah, lalu menyesuaikan kegiatan-kegiatan mereka sesuai dengan kebijakan yang ada.

Gerakan reformasi (*reform movement*), yaitu gerakan yang berupaya memperbaiki beberapa kepincangan atau aspek tertentu dalam masyarakat tanpa memperbarui secara keseluruhan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan eks HTI mengkoreksi kebiasaan/budaya masyarakat yang masih keliru misalnya kebiasaan masyarakat berhutang pada Bank ataupun gaya pacaran anak-anak muda termasuk sistem politik yang dianggap liberal. Mereka menawarkan sistem Islam sebagai solusi untuk melakukan perubahan sosial dalam masyarakat.

Gerakan perlawanan, yaitu gerakan yang berusaha melawan perubahan sosial tertentu. Mereka selalu mengkritik sistem politik demokrasi, dengan tetap menolak untuk terlibat dalam politik praktis seperti pilkada, serta menolak mengikuti terhadap kebijakan pemerintah, semisal vaksinasi saat wabah pandemi. Mereka menganggap

semua kebijakan tersebut bertentangan dengan sistem Islam sehingga tidak wajib untuk diikuti.

Jadi dapat disimpulkan dalam penelitian ini diantaranya eks HTI tetap melakukan gerakan sosial terhadap kebijakan pemerintah, hanya saja mereka tidak bergerak secara konfrontatif, namun lebih *soft* dan elastis. Mereka tidak unjuk kekuatan sebagaimana gerakan sosial rakyat melawan Soeharto pada tahun 1998, namun lebih kepada unjuk pemikiran dengan melakukan kritik atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dengan melakukan seminar, diskusi publik.

Selanjutnya, menurut teori gerakan sosial Tarrow, sebuah gerakan sosial memiliki satu frame dan satu aksi. Namun pada kasus eks HTI justru mereka melakukan perluasan isu dan lembaga. Mereka memiliki kemampuan untuk membuat beberapa lembaga baru dengan membawa isu yang berbeda pula. Hal ini bisa dianggap sebagai upaya mereka untuk bertahan dari ancaman pihak lain.

KESIMPULAN

Eksistensi gerakan sosial eks HTI di Bengkulu masih ada. Eks HTI diyakini tetap melakukan kegiatan meskipun masih masa pandemi, namun lebih banyak bersifat online (*daring*) daripada tatap muka. Gerakan sosial eks HTI di Bengkulu saat ini berbentuk non konfrontatif dengan melakukan diskusi publik dibanding aksi massa dengan jenis pola ekspresif, reformatif serta perlawanan. Tahap tahap gerakan sosial eks HTI, pendirian lembaga, framing isu, proses pengkaderan, pemberdayaan anggota. Temuan peneliti dapat memberi pandangan kepada Pemerintah untuk tidak perlu melarang kegiatan eks HTI, karena tidak terlihat kegiatan yang mengarah pada tindakan berbahaya untuk NKRI. Namun pemerintah perlu mengedukasi dan melakukan pendampingan kepada komunitas-komunitas eks HTI ataupun komunitas keagamaan yang lainnya agar tetap berada dalam bingkai nilai Pancasila dan UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2019. *Prosedur penelitian*.
- Azman, A. 2018. Gerakan Dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 7(1), 99–113.
- Burhan, B. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Damin, S. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Dalam Bidang Ilmu Sosial Ilmu-Ilmu Sosial Pendidikan dan Humaniora. *Yogyakarta: ASTI*.
- Fadillah Putra. 2006. *Gerakan Sosial*. Averroes Press.
- Huberman, M., & Miles, M. B. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. *UIPress. Jakarta*.
- Jayanto, D. D. 2017. *MANIFESTASI POLITIK IDENTITAS HTI DI KALANGAN SANTRI: STUDI KASUS HTI DI KABUPATEN JOMBANG*. Universitas Airlangga.
- Kurniawan, I. D. 2018. PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEWARGANEGARAAN LIBERAL DAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(2).
- Lexy J. Moleong, D. M. A. 2019. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). *PT. Remaja Rosda Karya*. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Manulu, D. 2016. Gerakan Sosial Dan Perubahan Kebijakan Publik Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon Utama, Di Porsea, Sumatera Utara. *Populasi*, 18(1).
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (n.d.). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara.
- Neuman, W. L. 2013. Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Ketujuh. *Jakarta: PT. Indeks*.
- Qohar, A., & Hakiki, K. M. 2017. Eksistensi Gerakan Idiologi Transnasional HTI Sebelum dan Pasca Pembubaran. *KALAM*, 11(2), 365–396. <https://doi.org/10.24042/KLM.V11I2.1403>
- Rafiuddin, M. 2015. MENGENAL HIZBUT TAHRIR (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU). *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 29–55.

Shobron, S. 2016. MODEL DAKWAH HIZBUT TAHRIR INDONESIA. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 15(1), 44–62.
<https://doi.org/10.23917/PROFETIKA.V15I1.1966>

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.